



Rancangan Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 telah selesai disusun yang merupakan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pasal 21 ayat 3 menyebutkan bahwa : “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4)”.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, Program-Program dan Kegiatan indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama sisa tahun berjalan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah.

Tersusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, besar harapan kami agar Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan yang memerlukannya, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan serta selalu dalam lindungan Allah SWT, aamiin

Kuala Tungkal, April 2025

INSPEKTUR DAERAH,

Drs. ENCEP IARKASIH, CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19701201 199009 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	20
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	21
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja	21
3.2. Rencana Program dan Kegiatan	21
3.3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	30
BAB IV PENUTUP	31

-----oOo-----

1.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung tujuan Inspektorat Daerah mengingat bahwa :

- a. Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi, dan program PD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan VI Tahun Anggaran 2025 yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian dan realisasi kinerja Perangkat Daerah serta capaian dan realisasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang telah tercapai.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA Perubahan bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja (RENJA) Perubahan.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melatar belakangi penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Dilingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dimaksud sebagai dokumen dan pedoman bagi seluruh personal Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang didasarkan pada RKPD Tahun 2024.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) disusun sebagai pedoman bagi :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Inspektorat;
2. Penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2025

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja inspektorat Sampai Dengan Triwulan IV
- 2.2. Analisis kinerja pelayanan inspektorat kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi inspektorat kabupatenTanjung Jabung Barat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2025
- 3.3. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi periode pelaksanaan triwulan I tahun 2025 Renja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Periode Pelaksanaan : Januari s/d Maret 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat daerah tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	unit Perangkat daerah yang bertanggung Jawab						
							I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01	Meningkatnya pelayanan administratif perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	600%	73,047,224,045	279	40,003,255,791	100%	16,034,037,840	33.8	1,666,666,301							34	1,666,666,301	313	41,669,922,092	52%	57.05%	Inspektorat
2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan	600%	89,100,000	300	45,970,000	100%	9,454,000	60	1,500,000							60	1,500,000	360	47,470,000	60%	53.28%	Inspektorat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	30 dokumen	89,100,000	20	45,970,000	5 Laporan	9,454,000	3	1,500,000							3	1,500,000	23	47,470,000	77%	53.28%	Inspektorat
2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan kantor	72 bln	27,124,005,228	24	18,125,790,975	12 bln	5,489,077,872	72.9	1,225,064,764							73	1,225,064,764	97	19,400,855,739	135%	71.53%	Inspektorat
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji/tunjangan	72 bulan	25,988,325,228	239	17,469,538,975	36 org	5,284,477,872	32	1,182,644,764							32	1,182,644,764	271	18,652,183,739	376%	71.77%	Inspektorat
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran honor pengadministrasi keuangan dan Jumlah pengadministrasi keuangan	72 dokumen	1,135,680,000	48	706,252,000	12 dokumen	204,600,000	3	42,420,000							3	42,420,000	51	748,672,000	71%	65.92%	Inspektorat
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase APIP yang mengikuti Diklat/JFA dan Bimtek	600%	3,625,370,393	285	1,121,766,235	100%	2,384,340,000	7.69	127,300,000							8	127,300,000	293	1,840,066,235	49%	50.76%	Inspektorat

		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (PDH)	342 paket	302,200,000	411	256,850,000	110 paket	133,000,000	-	0							411	256,850,000	120%	84.99%	Inspektorat
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP yang bersertifikasi sesuai dengan Jenjang Jabatannya	342 orang	3,323,170,393	212	1,455,916,235	124 orang	2,251,340,000	18	127,300,000							230	1,583,216,235	67%	47.64%	Inspektorat
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	600%	23,534,266,124	300	9,571,586,024	100%	5,214,327,200	6.52	227,248,406							207	9,798,834,430	34%	41.64%	Inspektorat
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	58 paket	99,372,103	32	41,049,597	8 paket	25,756,000		0							32	41,049,597	55%	41.31%	Inspektorat
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	304 paket	1,782,449,833	194	542,336,711	54 paket	545,851,000		0							194	542,336,711	64%	30.42%	Inspektorat
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum untuk tamu, acara rapat dan kegiatan	17 paket	1,385,900,000	11	417,399,500	3 paket	725,135,000	1	37,790,000							12	455,189,500	71%	32.84%	Inspektorat
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan bahan cetak dan penggandaan	78 paket	1,035,124,088	52	217,270,700	13 paket	494,962,200	1	450,000							53	217,720,700	68%	21.03%	Inspektorat
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan, publikasi dan informasi pengawasan	13 dokumen	103,800,000	7	25,310,000	2 dokumen	24,600,000	1	960,000							8	26,270,000	62%	25.31%	Inspektorat
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain di luar daerah	72 laporan	19,126,420,100	48	8,328,219,516	12 laporan	3,398,023,000	3	188,048,406							51	8,516,267,922	71%	44.53%	Inspektorat
		Pengadaan Baranag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	600%	12,509,944,100	300	8,518,200,550	100%	615,012,268		0							300	8,518,200,550	50%	68.09%	Inspektorat

		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Emoat dan Roda Dua	24 unit	2.631.000,000	17	2.793,286,000											17	2.793,286,000	71%	106.17%	Inspektorat
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pembelian Peralatan Gedung Kantor	216 unit	8.678.944,100	215	2.948,378,000	32 unit	615,012,268									215	2.948,378,000	100%	33.97%	Inspektorat
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (penambahan gedung baru)	4 paket	2.000.000,000	1	2.776,536,550											1	2.776,536,550	25%	138.83%	Inspektorat
		Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	600%	2.239,268,500	300	859,708,065	100%	859,996,500	25	57,507,172							225	912,215,237	38%	39.21%	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang diadministrasikan dan tersedianya sistem informasi surat menyurat berbasis web	72 laporan	49,500,000	48	12,010,000	12 laporan	13,000,000	3	650,000							51	12,660,000	71%	25.58%	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran listrik, telepon dan air	72 laporan	819,118,500	48	336,938,065	12 laporan	425,776,500	3	22,557,172							51	339,495,237	71%	43.89%	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	72 laporan	1,470,750,000	48	510,760,000	12 laporan	420,720,000	3	34,300,000							51	545,060,000	71%	37.06%	Inspektorat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan sarana dan prasarana aparatur	600%	3,813,169,700	266	1,119,233,942	100%	1,462,330,000	7.14	28,045,959							273	1,147,279,901	46%	30.09%	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kendaraan dinas operasional	162 unit	1,230,181,090	94	643,488,467	24 unit	474,310,000	1	6,750,000							95	650,238,467	59%	52.86%	Inspektorat

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		31 unit	1.417.264,100	15	249.536.333	5 unit	518.820,000	2	16.056.959							2	16.056.959	17	265.993,292	55%	18.74%	Inspektorat
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin	313 unit	946.964.550	158	136.751.982	54 unit	186.700,000	3	5.239,000							3	5.239,000	161	141.990,982	51%	15.01%	Inspektorat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan Jumlah petugas penjaga kantor	1 unit	219.760,000	1	89.457,160	1 unit	280.500,000	-	0							-	0	1	89.457,160	100%	40.71%	Inspektorat
01	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase ketaatan Perangkat Daerah dalam Penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)	85%	7.295.932,152	228	1.535.980,550	82%	3.157.440,000	2.50	107.875,000							2	107.875,000	230	1.643.855,550	271%	22.53%	Inspektorat
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1138 LHP	4.829.845,750	920	1.111.668,994	193 LHP	2.855,720,000	6.74	80.875,000							7	80.875,000	927	1.192.543,994	80%	24.69%	Inspektorat
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja pemerintah Daerah	186 laporan	621.475,000	156	88.262,000	31 lap	224.615,000	1	16.670,000							1	16.670,000	157	104.932,000	84%	16.88%	Inspektorat
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan pemerintah Daerah	224 laporan	1.226.475,000	220	80.610,804	44 laporan	716.115,000		0							-	0	220	80.610,804	0%	6.57%	Inspektorat
		Reviu Laporan Kinerja	umlah laporan Hasil Reviu Laporan kinerja	224 laporan	996.300,000	258	51.419,000	44 laporan	329.085,000	2	17.910,000							2	17.910,000	260	69.329,000	116%	6.96%	Inspektorat
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah	6 laporan	741.925,000	21	355.368,440	1 laporan	491.720,000	9	16.295,000							9	16.295,000	30	371.663,440	500%	50.09%	Inspektorat

		Pengawasan Desa	jumlah pengawasan desa yang dilaksanakan	390 laporan	549,288,750	233	126,388,250	65 laporan	870,915,000	1	3,000,000							1	3,000,000	234	129,388,250	60%	23.56%	Inspektorat
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	48 Dokumen	694,400,000	32	409,620,500	8 dokumen	223,260,000	-	27,000,000							-	27,000,000	32	436,620,500	0%	62.88%	Inspektorat
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu	600%	2,466,086,402	102	424,311,556	100%	301,720,000	0	27,000,000							-	27,000,000	20200%	461,311,556	34%	18.30%	Inspektorat
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara /Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara /Daerah yang Ditangani	48 laporan	541,566,250	32	206,425,000	8 laporan	79,720,000	-	12,000,000							-	12,000,000	32	218,425,000	67%	40.33%	Inspektorat
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	120 laporan	1,924,520,152	73	217,886,556	20 laporan	222,000,000	-	15,000,000							-	15,000,000	73	233,886,556	61%	12.10%	Inspektorat
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase rumusan kebijakan yang dilaksanakan dan kegiatan pendampingan asistensi yang berhasil	600%	4,549,223,659	248	1,405,790,468	100%	1,058,700,000	4.73	22,350,000							5	22,350,000	153	1,428,140,468	25%	31.39%	Inspektorat
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis	600%	428,275,000	265	110,935,000	100%	198,000,000	-	9,000,000							-	9,000,000	165	119,935,000	28%	28.00%	Inspektorat
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Dibidang Pengawasan Yang Disusun	3030 rekomendasi	428,275,000	2011	110,935,000	505 rekomendasi	198,000,000	-	9,000,000							-	9,000,000	2,011	119,935,000	66%	28.00%	Inspektorat
2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase hasil pendampingan dan asistensi	600%	4,120,948,659	300	1,294,855,468	100%	860,700,000	25	13,350,000							25	13,350,000	225	1,308,205,468	38%	31.75%	Inspektorat

		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Sosialisasi dan jumlah laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	108 kegiatan	2.626.610,461	76	1.082,785,600	17 kegiatan	665.500,000	5	9.000,000						5	9.000,000	81	1.091,785,600	75%	41.57%	Inspektorat
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan verifikasi Penegakan Integritas	53 perangkat Daerah	1.494.338,198	68	212.069,868	7 perangkat daerah	195.200,000	1	4.350,000						1	4.350,000	69	216.419,868	130%	14.48%	Inspektorat
					84,892,379,856		42,945,026,809		20,250,177,840		1,796,891,301						41	1,796,891,301		44,741,931,100			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	14						
Predikat kinerja																	Sangat Rendah						

Dari Pagu anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 sebesar Rp. 20.250.177.840,- dengan realisasi anggaran sampai dengan bulan Maret 2025 sebesar Rp. 1.796.891.301,- atau capaian realisasi sebesar 8,87, dari seluruh program dan kegiatan Inspektorat. Dari hasil evaluasi renja sampai di bulan Maret 2025 tingkat pencapaian belum sesuai dengan target Triwulan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam membuat kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan-kegiatan. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam RENSTRA yang mengacu terhadap RPJMD tahun 2021-2026.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi, yaitu :

a. Faktor Pendorong :

1. Mekanisme kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.
2. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
3. Adanya kerjasama yang baik dari perangkat daerah terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan.
4. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

b. Faktor Penghambat :

1. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibandingkan dengan jumlah objek yang diperiksa.
2. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat

pengawasan.

3. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan Perangkat Daerah masih belum optimal.
5. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangkapeningkatan kualitas pengawasan

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara keseluruhan sudah mulai berjalan dengan baik, walaupun tantangan kedepan terhadap SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih harus berbenah untuk meningkatkan nilai yang lebih baik.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan peran sebagai *quality assurance* (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan.
4. Maturitas Kapabilitas APIP di Tahun 2024 harus sudah mendapat level 3 dengan tetap mengedepankan profesionalisme APIP sebagai *quality assurance* bagi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat

III

Tujuan, Sasaran, Program,dan Kegiatan

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan tersebut memuat penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat dalam pencapaian tujuan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2021-2026.

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu rencana.

Adapaun tujuan dan sasaran yang sudah tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

- Meningkatkan Tata Kelola Pengawasan Pemerintah Daerah.

b. Sasaran

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengawasan.
- Meningkatnya maturitas penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Atas Kinerja Perangkat Daerah

Dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rancangan Awal rencana kerja (RENJA).

3.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2025

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil

yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Inspektorat yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis yang mengacu pada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Untuk besaran Anggaran pada Program dan kegiatan yang ada pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Renja tahun 2025 pada pagu Rp. 18,741,683,008,- Seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel
Rumusan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		PAGU (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Berkurang/ Bertambah
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	8	9	10 = 9 - 8
6.01.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100%	100%	12,901,509,640	12,901,509,640	0
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Inspektorat	100%	100%	9,200,000	9,200,000	0
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	5 Laporan	5 Laporan	9,200,000	9,200,000	0
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Inspektorat	12 Bulan	12 Bulan	5,498,197,872	5,498,197,872	0
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	36 org	36 org	5,284,477,872	5,284,477,872	0
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat	12 Dokumen	12 Dokumen	213,720,000	213,720,000	0
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Inspektorat	100%	100%	2,228,340,000	2,228,340,000	0
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Inspektorat	110 Paket	110 Paket	133,000,000	133,000,000	0
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Inspektorat	124 Org	124 Org	2,095,340,000	2,095,340,000	0
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Inspektorat	100%	100%	2,699,466,000	2,699,466,000	0
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Inspektorat	8Paket	8Paket	25,756,000	25,756,000	0
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Inspektorat	54 Paket	54 Paket	384,466,000	384,466,000	0

6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Inspektorat	3 Paket	3 Paket	534,100,000	534,100,000	0
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Inspektorat	13 Paket	13 Paket	380,274,000	380,274,000	0
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Inspektorat	2 Dokumen	2 Dokumen	24,600,000	24,600,000	0
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	12 Laporan	12 Laporan	1,350,270,000	1,350,270,000	0
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Inspektorat	100%	100%	615,012,268	615,012,268	0
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Inspektorat			0	0	0
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Inspektorat	32 Unit	32 Unit	615,012,268	615,012,268	0
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Inspektorat			0	0	0
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		Inspektorat	100%	100%	779,496,500	779,496,500	0
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	12 Laporan	12 Laporan	13,000,000	13,000,000	0
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Inspektorat	12 Laporan	12 Laporan	345,776,500	345,776,500	0
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Inspektorat	12 Laporan	12 Laporan	420,720,000	420,720,000	0

6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inspektorat	100%	100%	1,071,797,000	1,071,797,000	0
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Inspektorat	24 Unit	24 Unit	317,500,000	317,500,000	0
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Inspektorat	5 Unit	5 Unit	312,457,000	312,457,000	0
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Inspektorat	54 Unit	54 Unit	161,340,000	161,340,000	0
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	Inspektorat	1 Unit	1 Unit	280,500,000	280,500,000	0
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			82%	82%	1,795,300,000	1,795,300,000	0
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Inspektorat	193 LHP	193 LHP	1,493,580,000	1,493,580,000	0
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat	31 Lap	31 Lap	90,000,000	90,000,000	0
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	44 Lap	44 Lap	501,850,000	501,850,000	0
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	44 Lap	44 Lap	102,625,000	102,625,000	0
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	1 Lap	1 Lap	275,500,000	275,500,000	0
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Inspektorat	65 Lap	65 Lap	300,345,000	300,345,000	0
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	8 Dokumen	8 Dokumen	223,260,000	223,260,000	0
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Inspektorat	100%	100%	301,720,000	301,720,000	0
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Inspektorat	8 Lap	8 Lap	79,720,000	79,720,000	0
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	20 Lap	20 Lap	222,000,000	222,000,000	0

6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			100%	100%	1,062,950,000	1,062,950,000	0
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Inspektorat	100%	100%	198,000,000	198,000,000	0
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Inspektorat	505 Rekomendasi	505 Rekomendasi	198,000,000	198,000,000	0
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi		Inspektorat	100%	100%	864,950,000	864,950,000	0
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	17 Kegiatan	17 Kegiatan	669,750,000	669,750,000	0
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	195,200,000	195,200,000	0
						15,759,759,640	15,759,759,640	0

3.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) berpedoman pada renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat Daerah merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

IV

Penutup

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2021-2026. Renja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam anggaran Tahun 2025 sehingga pada akhir tahun pelaksanaan anggaran dapat terukur dan terlaksana sesuai tujuan.

Seluruh program dan kegiatan yang di rencanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan RKPD Provinsi Jambi yang di sesuaikan juga dengan pagu anggaran yang di terima Inspektorat.

Dengan demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapat prioritas dalam kebijakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi implementasi program peningkatan pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam hal penyelenggaraan pengawasan/audit atas instansi pemerintahan dan aparatur pemerintah, selain itu alokasi anggaran yang di terima akan di prioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengawas dan pemeriksa agar kualitas pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan/audit mengalami peningkatan.

Kuala Tungkal, April 2025
INSPEKTUR DAERAH,

Drs. ENCEP JARKASIH, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19701201 199009 1 001